



**PEMERINTAH
KABUPATEN TABALONG**

**RANCANGAN AWAL (RANWAL)
RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2027**



**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TABALONG**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong Tahun 2027 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta mempunyai orientasi pada hasil yang diharapkan.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong ini juga merupakan dokumen dasar dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong Tahun 2027 ini diharapkan dapat memberikan arah institusi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Tanjung, Januari 2026
Kepala Dinas,

HASYAM ANI, S.P., M.P
Pembina Utama Muda (IVc)
NIP. 19750504 200003 1 012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A Latar Belakang.....	1
B Landasan Hukum.....	6
C Maksud dan Tujuan.....	10
D Sistematika Penulisan.....	11
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU..	14
A Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan Capaian Renstra SKPD.....	14
B Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	43
C Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	48
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	53
A Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	53
B Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.....	56
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH....	60
BAB V PENUTUP	96
A Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian, Baik Dalam Rangka Pelaksanaannya maupun Seandainya Ketersediaan Anggaran Tidak Sesuai dengan Kebutuhan.....	97
B Kaidah-kaidah Pelaksanaan.....	97
C Rencana Tindak Lanjut.....	98

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil pelaksanaan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana s/d Tahun 2026 Kabupaten Tabalong.....	17
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	45
Tabel 3.1	Prioritas dan Sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	57
Tabel 3.2	Tujuan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	58
Tabel 3.3	Sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	58
Tabel 3.4	Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	59
Tabel 4.1	Sasaran Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	61
Tabel 4.2	Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2027.....	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alur Rancangan Renja OPD Kabupaten/kota.....	4
Gambar 1.2	Bagan Alur Hubungan Perencanaan dan Penganggaran.....	5
Gambar 1.3	Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah.....	5

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tahapan Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan di daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,

Renja SKPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya, dan Pembangunan daerah pada umumnya. Renja SKPD memiliki fungsi sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada Masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Dokumen rancangan awal Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong Tahun 2027 memuat berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2027, yang merupakan penjabaran visi, misi dan program dari Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029.

Rancangan awal Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2027 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan Pembangunan daerah, karena rancangan awal Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong Tahun 2027 pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tabalong Tahun 2027.

Selanjutnya rancangan awal Renja SKPD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD dan Kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

Dikaitkan dengan Visi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yakni “**MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA MENUJU TABALONG SMaRT (SEJAHTERA, MAJU, RELIGIUS DAN TERDEPAN)**”. Dan Misi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana, yakni:

1. Mewujudkan Perlindungan Sosial;
2. Mewujudkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Mewujudkan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
4. Mewujudkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Pemerintah sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong. Sehubungan dengan hal tersebut, mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tabalong menyusun Dokumen rancangan awal Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 yang berdasarkan Surat Edaran Bupati Tabalong Nomor: B-1/BAPPERIDA/000.7/II/2026 tanggal 08 Januari 2026..

Berangkat dari latar belakang tersebut maka untuk setiap tahun Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tabalong membuat Renja yang merupakan rencana kegiatan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan tahunan tersebut.

1) Pengertian Renja

Renja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian. Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Tabalong

merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Tabalong yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai Peraturan Bupati Tabalong No. 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong.

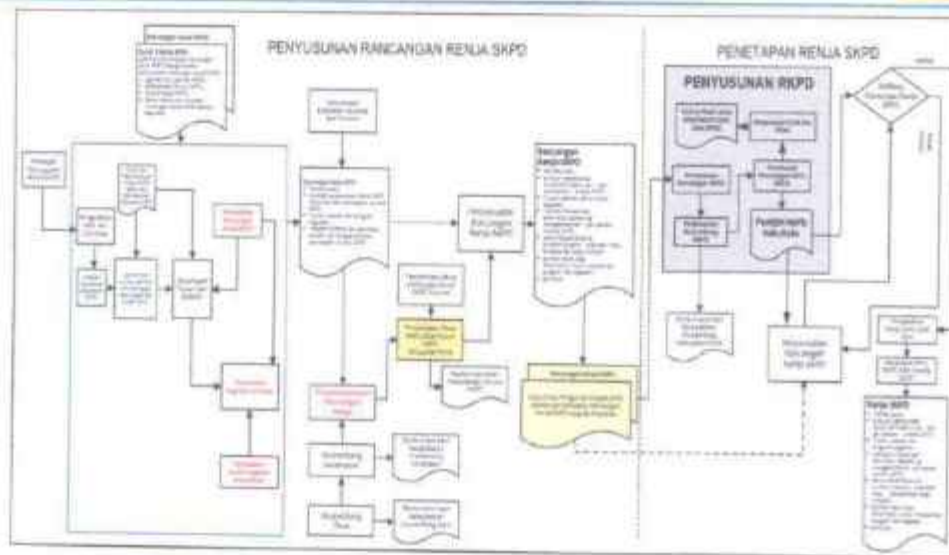
Agar pelaksanaan tugas yang telah digariskan berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Renja OPD menjadi mutlak, yaitu sebagai pedoman untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

2) Proses Penyusunan Renja

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

Prinsip Penyusunan:

1. Substansi Renja OPD merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja OPD yang disesuaikan dengan Perkada RKPD.
2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan.
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/ kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.
4. Renja OPD merupakan dokumen resmi program dan kegiatan OPD yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA OPD setelah memerhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).



Gambar 1.1 Bagan Alur Rancangan Renja OPD Kabupaten/Kota

Adapun tahapan persiapan penyusunan Renja yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Persiapan Penyusunan Renja

- Pembentukan Tim Penyusun Renja
- Orientasi mengenai Renja
- Penyusunan Agenda Kerja Tim Renja
- Pengumpulan Data dan Informasi

b. Pengolahan Data dan Informasi

Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait di tiap tahap perumusan penyusunan rancangan Renja.

c. Tahap Perumusan Rancangan Renja

- Pengolahan data dan informasi;
- Analisis gambaran pelayanan OPD;
- Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD;
- Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD
- Telaah terhadap rancangan awal RKPD
- Perumusan tujuan dan sasaran;
- Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
- Perumusan kegiatan prioritas;
- Penyajian awal dokumen rancangan Renja OPD;
- Penyempurnaan rancangan kerja OPD;
- Pembahasan forum OPD; dan
- Penyesuaian dokumen rancangan Renja OPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.

- d. Penyajian dan penyampaian rancangan Renja
- e. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan renja yang mengacu pada Rancangan Akhir RKPD
- f. Penetapan Renja.

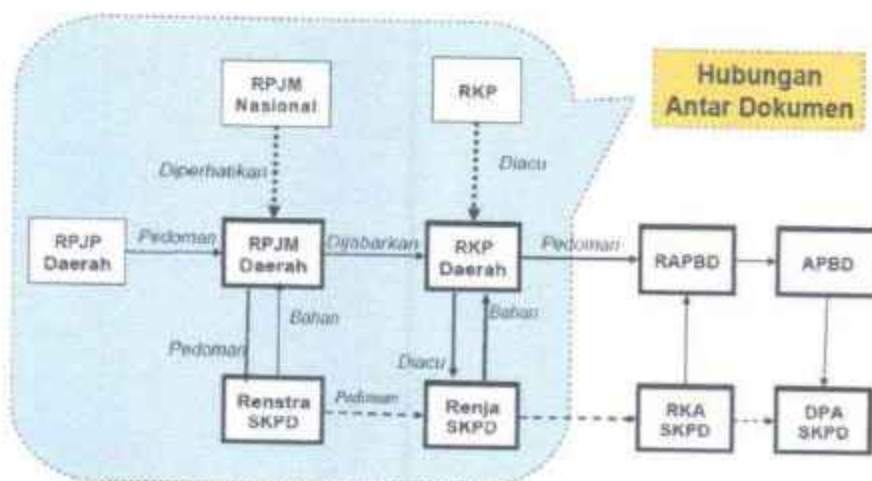
Adapun skema hubungan perencanaan dan penganggaran dibawah ini:



Gambar 1.2 Bagan Alur Hubungan Perencanaan dan Penganggaran

3) Keterkaitan Antara Renja OPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Rencana Kerja SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.



Gambar 1.3 Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

B. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan rencana kerja (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat. Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
 9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Penanganan Fakir Miskin;
 10. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 17. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
19. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
21. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 Tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
23. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Pekerjaan Terburuk Anak;
24. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
25. Intruksi Presiden Nomor 05 Tahun 1995 tentang Peningkatan Peranan Wanita dalam Pembangunan Daerah;
26. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender;
27. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
29. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 04 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
30. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak;
31. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/ Kota Layak Anak;
32. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak;

33. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/ Kota Layak Anak;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Rancangan Awal atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);
39. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 55/HK-010/B5/2010 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota;
40. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 078 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Data Gender dan Anak di Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 078);
41. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 109 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 109);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor

- 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2025 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
45. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);

C. Maksud dan Tujuan

Maksud :

Adapun maksud dari pembuatan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong Tahun 2027 adalah:

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong untuk satu tahun anggaran;
2. Memberikan arah bagi pelaksanaan kegiatan dalam jangka satu tahun depan;
3. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
4. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah.

Tujuan :

Tujuan dari pembuatan rencana kerja (RENJA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong Tahun 2027 adalah:

1. Tersedianya dokumen perencanaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong Tahun 2027;
2. Sebagai pedoman / acuan dalam penyusunan RKA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong Tahun 2027.

D. Sistematika Penulisan

Rancangan awal rencana kerja (Renja) Tahun 2027 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah, Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

B. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

C. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

D. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial, pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 dan perkiraan capaian tahun 2026, selanjutnya realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, tentang Standar Pelayanan Minimal, maupun terhadap IKK sesuai

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jenis Indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

1. Se jauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat daerah dan hal kritis terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah; Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat daerah provinsi dengan Perangkat Daerah Kabupaten / Kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi daerah, terhadap capaian program nasional / internasional seperti NSPK, SPM, dan SDGs (Sustainable Development Goals);
4. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

A. Telaahan terhadap Kebijakan nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

B. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

C. Program dan Kegiatan berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam

perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang rencana kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2027 dengan menyertai penjelasan sumber pendanaannya.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- A. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- B. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- C. Rencana tindak lanjut pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan Kepala Perangkat Daerah, sert cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA SKPD

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari satu Sekretariat, lima bidang, satu Unit Pelaksana Terpadu. Hasil Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana s/d Tahun 2025 secara umum telah dilaksanakan dengan optimal dan beberapa kegiatan telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan dapat terlaksananya hampir semua kegiatan dan dapat memenuhi *output* yang diharapkan.

Evaluasi hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana s/d tahun 2025 dan perkiraan capaian tahun 2026 (Tahun Berjalan).

Total pagu anggaran setelah perubahan Tahun 2025 Dinas Sosial sebesar Rp. 50.609.823.121,- dengan realisasi sebesar Rp. 44.151.824.987,- (87,24%) yang dilaksanakan pada 6 Program 16 Kegiatan dan 35 Sub Kegiatan. Secara umum tidak semua anggaran Tahun 2025 dapat direalisasikan secara maksimal, hal tersebut disebabkan antara lain:

1. Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan realisasi sebesar Rp. 10.693.978,- dari pagu sebesar Rp. 23.545.000,- atau 45,42%. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan tenaga yang melakukan kegiatan lapangan sehingga pelaksanaan kegiatan tidak berjalan optimal sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi sebesar Rp. 4.406.680.816,- dari pagu sebesar Rp. 7.065.234.000,- atau 62,37%. Hal tersebut dikarenakan realisasi menyesuaikan jumlah ASN dan PPPK yang ada.
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan realisasi sebesar Rp. 30.400.000,- dari pagu sebesar Rp. 38.850.000,- atau 78,25%. Hal tersebut dikarenakan proses negosiasi atau kompetensi di E-Kataloq.
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah dengan realisasi sebesar Rp. 392.278.507,- dari pagu sebesar Rp. 502.007.597,-. Hal tersebut dikarenakan kebutuhan riil atau harga pasar yang tersedia di E-Kataloq lebih murah dari yang dianggarkan (Karena melalui proses negosiasi atau kompetisi E-Kataloq), serta adanya belanja

modal yang tidak dapat direalisasikan karena harga riil atau harga pasar lebih besar dari yang dianggarkan.

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan realisasi sebesar Rp. 864.260.720,- dari pagu sebesar Rp. 1.106.361.140,-. Hal tersebut dikarenakan setiap bulannya pemakaian listrik, air, internet tidak dapat diprediksi, serta adanya silpa pada belanja makanan dan minuman rapat.
6. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota dengan realisasi sebesar Rp. 182.537.010,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 302.948.399,-. Hal tersebut dikarenakan penyesuaian kondisi di lapangan.

Sementara Total pagu anggaran setelah perubahan Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana sebesar Rp. 17.023.423.246,- dengan realisasi sebesar Rp. 14.371.945.913,- (84,42%) yang dilaksanakan pada 10 Program 27 Kegiatan dan 61 Sub Kegiatan. Secara umum tidak semua anggaran Tahun 2025 dapat direalisasikan secara maksimal, hal tersebut disebabkan antara lain:

1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan realisasi sebesar Rp. 195.639.679,- dari pagu sebesar Rp. 287.158.399,- atau 68,13%. Hal tersebut dikarenakan keterlambatan pelaksanaan program atau kegiatan yang berdampak pada rendahnya realisasi pada periode awal dan pertengahan tahun, adanya silpa pada belanja barang dan jasa seperti Material, ATK, kertas dan cover, bahan cetak, bahan komputer, alat listrik, fotocopy karena proses negosiasi atau kompetensi di E-katalog serta tidak terlaksananya belanja kursus singkat, pelatihan, dan silpa pada belanja perjalanan dinas biasa diantaranya penggunaan penginapan 30% dalam provinsi, silpa pada tiket pesawat, transport, penginapan dan uang harian keluar provinsi.
2. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan realisasi sebesar Rp. 179.150.902,- dari pagu sebesar Rp. 233.725.787,- atau 76,65%. Hal tersebut dikarenakan kebutuhan riil atau harga pasar yang tersedia di E-Katalog lebih murah dari yang dianggarkan (Karena melalui proses negosiasi atau kompetisi E-Katalog), serta adanya belanja modal yang tidak dapat direalisasikan karena harga riil atau harga pasar lebih besar dari yang dianggarkan.
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan realisasi sebesar Rp. 813.843.146,- dari pagu sebesar Rp. 1.098.705.766,- atau 74,07%. Hal tersebut dikarenakan setiap bulannya pemakaian listrik, air, internet tidak dapat diprediksi, serta adanya silpa pada belanja makanan dan minuman rapat yang hanya terlaksana 4 kali, silpa pada belanja honorarium

penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan serta silpa pada belanja jasa tenaga pelayanan umum, tenaga kebersihan, keamanan dan supir, silpa pada belanja bahan lainnya, perabot kantor, penambah daya tahan tubuh, dan pakaian batik tradisional.

4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan realisasi sebesar Rp. 333.636.724,- dari pagu sebesar Rp. 622.613.982,- atau 53,59%. Hal tersebut dikarenakan Roda 4 berjumlah 7 buah, kendaraan Roda 2 berjumlah 38 buah dengan kondisi layak jalan, 1 kendaraan operasional sekretariat kurang baik, 8 kendaraan dikembalikan ke aset dan 2 buah kendaraan bermasalah sehingga hanya sebagian kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 yang mendapatkan perawatan, serta AC window kondisi baik sebanyak 1 unit, AC Split kondisi baik 8 unit, Printer sebanyak 50 kondisi baik, Laptop sebanyak 41 unit dalam kondisi baik, PC sebanyak 9 unit dalam kondisi baik sehingga tidak semua peralatan dan mesin lainnya yang dilakukan pemeliharaan.
5. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota dengan realisasi sebesar Rp. 115.240.417,- dari pagu sebesar Rp. 144.665.943,- atau 79,66%. Hal tersebut dikarenakan adanya silpa pada belanja penggandaan, belanja perjalanan biasa, makanan dan minuman di rumah perlindungan tidak semua terealisasi karena sesuai dengan kebutuhan korban (kasus yang masuk tidak bisa diprediksi serta penggunaan anggaran hanya dapat digunakan untuk layanan korban).

Kemudian untuk tahun 2026 Pagu serapan tahun anggaran berjalan (2026 sampai dengan 11 Februari 2026 ini mencapai Rp. 606.170.022,- (1,15%) dari pagu sebesar Rp. 52.632.563.747,- hal tersebut disebabkan:

1. Perubahan SOTK sehingga harus melakukan penyesuaian.
2. Penyusunan rancangan anggaran kas baru dapat dilaksanakan pertengahan Januari 2026 karena adanya kendala pada pengalihan anggaran dari SIPD penganggaran ke SIPD Penatausahaan.
3. Penetapan DPA pada tanggal 9 Januari 2026;
4. Penginputan SiRUP baru selesai pada tanggal 31 Januari 2026.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil pelaksanaan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana s/d Tahun 2026

Kabupaten Tabalong

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2027)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2025			Target Program / Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian		Catatan
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2026		
													Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat capaian (%)	
1						2	3	4	5	6	7=(7/6)*100	8	9	10=(10/5)*100	11
						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
1	06	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat Nilai AKIP	A	A	A	81,60%	BB	BB	100%	
1	06	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Hasil Perencanaan dan Pelaporan yang dijadikan Bahan Evaluasi Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	06	01	2	01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	15 Laporan	16 Laporan	100%	14 Laporan	14 Laporan	100%	
1	06	01	2	01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	4 Dokumen	5 Dokumen	6 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	
1	06	01	2	01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	4 Data	5 Data	6 Data	100%	6 Data	6 Data	100%	

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2027)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2025			Target Program / Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian		Catatan
								Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat capaian (%)	
1					2	3	4	5	6	$7 = (7/6) \times 100$	8	9	$10 = (10/5) \times 100$	11
1	06	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang Tertib, Akuntabel dan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	06	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang			57 Orang	57 Orang	100%	
1	06	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu, Mutakhir dan Terdokumentasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	06	01	2	05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	2 Paket	3 Paket	3 Paket	30 Pakaet	30 Pakaet	100%
1	06	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum yang Terlaksananya Sesuai SOP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	06	01	2	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	3 Paket	4 Paket	100%	2 Paket	2 Paket	100%
1	06	01	2	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	13 Paket	14 Paket	100%	30 Pakaet	30 Pakaet	100%
1	06	01	2	06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	2 Paket	100%
1	06	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	20 Paket	100%	20 Paket	20 Paket	100%
1	06	01	2	06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
1	06	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi/SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	71 Laporan	72 Laporan	100%	65 Laporan	65 Laporan	100%
1	06	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik daerah yang sesuai dengan yang direncanakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	06	01	2	07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	35 Unit	24 Paket	19 Paket	79,16%	35 Unit	35 Unit	100%
1	06	01	2	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Unit	31 Unit	5 Unit	16,13%	5 Unit	5 Unit	100%

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2027)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2025			Target Program / Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian		Catatan
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2026		
													Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat capaian (%)	
1						2	3	4	5	6	7=(7/6)*100	8	9	10=(10/5)*100	11
							yang Disediakan								
1	06	01	2	07	0009	Pengadsan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%	
1	06	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Fasilitas/ Disediakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	06	01	2	08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	100%	24 Laporan	24 Laporan	100%	
1	06	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	48 Laporan	48 Laporan	100%	48 Laporan	48 Laporan	100%	
1	06	01	2	08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perafatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	100%	24 Laporan	24 Laporan	100%	
1	06	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan	48 Laporan	48 Laporan	100%	48 Lapiran	48 Lapiran	100%	
1	06	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang yang dipelihara dan berfungsi sesuai Kondisi Standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	06	01	2	09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	55 Unit	47 Unit	36 Unit	76,60%	55 Unit	55 Unit	100%	
1	06	01	2	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	35 Unit	48 Unit	45 Unit	93,75%	35 Unit	35 Unit	100%	
1	06	01	2	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	2 Unit	2 Unit	100%	
1	06	2				PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang Berkontribusi dalam Proses Penanganan PPKS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	06	02	2	02		Pengembangan Potensi Sumber	Jumlah PPKS yang Berpartisipasi dalam				100%			100%	

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2027)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2025			Target Program / Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian		Catatan
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat capaian (%)	
1						2	3	4	5	6	7=(7/6)*100	8	9	10=(10/5)*100	11
						Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial								
1	06	02	2	02	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang		3 Dokumen	3 Dokumen	100%				
1	06	02	2	03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PPKS yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial				100%			100%	
1	06	02	2	03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		60 Orang						
1	06	02	2	03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		434 Orang						
1	06	02	2	03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi SumberKesejahteraan Sosial Kelembagaan MasyarakatKewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Lembaga	2 Lembaga			10 Lembaga	10 Lembaga	100%	
1	06	02	3	03	0010	Facilitasi Pembinaan Penghargaan dan SantunanSosial bagi Warakawuri/Keluarga Pahlawan Nasional,Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda PerintisKemerdekaan	Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	26 Orang				26 Orang	26 Orang	100%	
1	06	02	3	03	0011	Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-NilaiKepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, danRestorasi Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	38 Orang				38 Orang	38 Orang	100%	
1	06	02	2	03	0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial	113 Orang				112 Orang	112 Orang	100%	

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2027)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2025			Target Program / Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian		Catatan
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat capaian (%)	
1						2	3	4	5	6	7=(7/6)*100	8	9	10=(10/5)*100	11
						Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya								
1	06	04				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar sesuai Standar Muta	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	06	04	2	01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS SPM yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	06	04	2	01	0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	4.950 Orang	1.730 Orang			4.950 Orang	4.950 Orang	100%	
1	06	04	2	01	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakain dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	1865 Orang	50 Orang			1865 Orang	1865 Orang	100%	
1	06	04	2	01	0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	63 Orang				63 Orang	63 Orang	100%	
1	06	04	2	01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	21 Orang				21 Orang	21 Orang	100%	
1	06	04	2	01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang				10 Orang	10 Orang	100%	

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2027)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2025			Target Program / Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian		Catatan
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat capaian (%)	
1						2	3	4	5	6	7=(7/6)*100	8	9	10=(10/5)*100	11
1	06	04	2	01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	90 Orang	1.000 Orang			90 Orang	90 Orang	100%	
1	06	04	2	01	0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	67 Orang				67 Orang	67 Orang	100%	
1	06	04	2	01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	140 Orang				140 Orang	140 Orang	100%	
1	06	04	2	01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang				20 orang	20 orang	100%	
1	06	04	2	01	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang				3 Orang	3 Orang	100%	
1	06	04	2	01	0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	105 orang				105 orang	105 orang	100%	
1	06	04	2	01	0014	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	16 Orang				16 Orang	16 Orang	100%	
1	06	04	2	01	0017	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang				12 Orang	12 Orang	100%	
1	06	04	2	02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PPKS Non SPM yang Mendapatkan Pelayanan dan Pembinaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2027)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2025			Target Program / Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian		Catatan
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat capaian (%)	
1						2	3	4	5	6	$7 = (7/6) \times 100$	8	9	$10 = (10/5) \times 100$	11
						Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantli Sosial									
1	06	04	2	01	0017	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	10 Dokumen	4 Dokumen			10 Dokumen	10 Dokumen	100%	
1	06	05				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Keluarga Miskin yang Menerima Pelayanan Kesejahteraan Sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
							Persentase Keluarga Miskin yang Memperoleh Bantuan Sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	06	05	2	01		Pemeliharaan Anak-Anak Tertantar	Jumlah Anak Pantli yang Mendapatkan Bantuan	510 Orang				510 Orang	511 Orang	100%	
1	06	05	2	01	0001	Penjangkauan Anak-Anak Tertantar	Jumlah Anak-Anak Tertantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	510 Orang	610 Orang			510 Orang	510 Orang	100%	
1	06	05	2	02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PPKS yang Mendapatkan Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	15000 Orang				15000 Orang	15000 Orang	100%	
1	06	05	2	02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	15000 Orang	500 Orang			15000 Orang	15000 Orang	100%	
1	06	05	2	02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota		5.000 Keluarga						
1	06	05	2	02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Orang				120 Orang	120 Orang	100%	
1	06	05	2	02	0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15000 Orang				15000 Orang	15000 Orang	100%	

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2027)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2025			Target Program / Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian		Catatan
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat capaian (%)	
1						2	3	4	5	6	7=(7/6)*100	8	9	10=(10/5)*100	11
1	06	05	2	02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		5000 Keluarga						
1	06	05	2	02	0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindakayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	12 Usulan				12 Usulan	12 Usulan	100%	
1	06	05	2	02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		1.370 Orang						
1	06	06				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Keluarga Miskin yang Mendapat Perlindungan Sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	06	06	2	01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Beperstok untuk Keluarga Korban Bencana	20 Paket				20 Paket	20 Paket	100%	
1	06	06	2	01	0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Perumahan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	5000 Orang	100 Orang			5000 Orang	5000 Orang	100%	
1	06	06	2	01	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1000 Orang	100 Orang			1000 Orang	1000 Orang	100%	
1	06	06	2	01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang				30 Orang	30 Orang	100%	
1	06	06	2	01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang				50 Orang	50 Orang	100%	
1	06	06	2	01	0007	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Tempat				1 Tempat	1 Tempat	100%	

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2027)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2025			Target Program / Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian		Catatan
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat capaian (%)	
1						2	3	4	5	6	7=(7/6)*100	8	9	10=(10/5)*100	11
1	06	06	2	02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan BencanaKabupaten/Kota	Jumlah jiwa terdampak bencana yang mendapatkan bantuan (Bencana Banjir)	50 Jiwa				50 Jiwa		100%	
1	06	06	2	02	0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan KampungSiaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Kampung	3 Kampung			3 Kampung	3 Kampung	100%	
1	06	06	2	02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna SiagaBencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	30 Orang			25 Orang	25 Orang	100%	
1	06	06	2	02	0003	Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna SiagaBencana Tingkat Muda	Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkatkan Kapasitasnya	20 Orang				20 Orang	20 Orang	100%	
1	06	06	2	02	0005	Fasilitasi Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana	Jumlah kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi	3 Desa / Kelurahan				3 Desa / Kelurahan	3 Desa / Kelurahan	100%	
1	06	06	2	02	0007	Fasilitasi Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagiKorban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai	50 Keluarga				50 Keluarga	50 Keluarga	100%	
1	06	06	2	02	0008	Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencanapada Anak Usia Sekolah	Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana	250 Orang				250 Orang	250 Orang	100%	
1	06	07				PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase PSKS yang Berkontribusi dalam Proses Penangan PPKS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	06	07	2	01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	2 Makam				2 Makam	2 Makam	100%	
1	06	07	2	01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	2 Makam				2 Makam	2 Makam	100%	
						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANANDASAR									

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2027)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2025			Target Program / Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian		
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian	Catatan
1						2	3	4	5	6	7=(7/6)*100	8	9	10=(10/5)*100	11
2	08					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
2	08	02				PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	31%	20%	64,32%	100%	28%	28%	100%	
							Persentase Perempuan yang ditingkatkan Keterampilan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	08	02	2	01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SKPD yang Melaksanakan Responsif Gender	38 SKPD	42 SKPD	41 SKPD	100%	38 SKPD	39 SKPD	100%	
2	08	02	2	01	0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG		70 Orang	140 Orang	116%				
2	08	02	2	01	0011	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan					81 Lembaga	92 Lembaga	100%	
2	08	02	2	01	0015	Advokasi dan sosialisasi terkait penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota	81 Lembaga							
2	08	02	2	02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Angkatan Kerja Perempuan yang Mendapatkan Advokasi	100 Orang	-	-	-	100 Orang	100 Orang	100%	
2	08	02	2	02	0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota		3 Dokumen	3 Dokumen	100%				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2027)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2025			Target Program / Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian		Catatan
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2026		
								Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7=(7/6)*100	8	9	10=(10/5)*100	11
2 08 02 2 02 0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota		5 Organisasi	5 Organisasi	100%				
2 08 02 2 02 0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi					5 Lembaga	5 Lembaga	100%	
2 08 02 2 02 0006	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi					160 Orang	160 Orang	100%	
2 08 02 2 02 0011	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM organisasi kemasyarakatan, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	160 Orang							
2 08 02 2 02 0013	Advokasi dan sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan/atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	5 Lembaga							
2 08 02 2 03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan PerempuanKewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Koordinasi dan Kolaborasi antar Lembaga Sistem Penyelenggaraan Program Pemberdayaan Perempuan yang Lebih Efektif dan Responsif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2 08 02 2 03 0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas		140 Orang	140 Orang	100%				

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2027)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2025			Target Program / Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian		Catatan
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2026		
													Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat capaian (%)	
1						2	3	4	5	6	7=(7/6)*100	8	9	10=(10/5)*100	11
2	08	02	2	03	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia		3 Dokumen	3 Dokumen	100%				
2	08	02	2	03	0007	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan					5 Lembaga	5 Lembaga	100%	
2	08	02	2	03	0008	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan					1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
2	08	02	2	03	0013	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	5 Lembaga							
2	08	02	2	03	0014	Kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kab/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	1 Dokumen							
2	08	03				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan komprehensif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	08	03	2	01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Kekerasan Perempuan yang ditindaklanjuti dan atau diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	08	03	2	01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		1 Dokumen	1 Dokumen	100%				
2	08	03	2	01	0004	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan					1 Dokumen	1 Dokumen	100%	

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2027)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2025			Target Program / Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian		
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2026		Catatan
													Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat capaian (%)	
1						2	3	4	5	6	7=(7/6)*100	8	9	10=(10/5)*100	11
						Kabupaten/Kota									
2	08	03	2	01	0009	Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KIP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KIP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tingkat Kab/Kota, dan masyarakat	1 Kegiatan							
2	08	03	2	03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Petugas Layanan yang telah mengikuti pelatihan penanganan perempuan korban kekerasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	08	03	2	03	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100%					
2	08	03	2	03	0007	pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan				40 Orang	41 Orang	100%		
2	08	03	2	03	0013	Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat Kab/Kota (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	40 Lembaga							
2	08	04				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak sesuai Standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	08	04	2	01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keluarga Sasaran yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2027)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2025			Target Program / Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian		
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2026		Catatan
								Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7=(7/6)*100	8	9	10=(10/5)*100	11
208042010002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia		1 Dokumen	1 Dokumen	100%				
208042010003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		2 Dokumen	2 Dokumen	100%				
208042010006	Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang				10 Orang	10 Orang	100%	
208042010007	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.	1 Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
20804202	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan KualitasKeluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam	Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang memenuhi standar layanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2027)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2025			Target Program / Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian		Catatan
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2026		
													Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat capaian (%)	
1						2	3	4	5	6	7=(7/6)*100	8	9	10=(10/5)*100	11
						DaerahKabupaten/Kota									
2	08	04	2	02	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		180 Orang	180 Orang	100%				
2	08	04	2	02	0007	peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	6 Lembaga				6 Lembaga	6 Lembaga	100%	
2	08	05				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	08	05	2	01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak DalamKelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengumpulan, Pengolahan Analisis Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	08	05	2	01	0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia		1 Dokumen	1 Dokumen	100%				
2	08	05	2	01	0003	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
2	08	05	2	01	0007	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kab/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak tingkat Kab/Kota yang Tersedia	1 Dokumen							
2	08	06	2	01		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (PHA)	63 Indeks	62 Indeks	60,970 Indeks	98,34%	62 Indeks	63 Indeks	100%	
2	08	06	2	01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia UsahaKewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan Layak Anak	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2027)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2025			Target Program / Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian		Catatan
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2026		
													Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat capaian (%)	
1						2	3	4	5	6	7=(7/6)*100	8	9	10=(10/5)*100	11
2	08	06	2	01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha		203 Organisasi	204 Organisasi	100%				
2	08	06	2	01	0003	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota					12 Lembaga	12 Lembaga	100%	
2	08	06	2	01	0009	Bimbingan Teknis dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Perangkat Daerah Kab/Kota serta lembaga non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan Kab/Kota yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	240 Orang							
2	08	06	2	02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas HidupAnak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang memenuhi standar layanan ramah anak.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	08	06	2	02	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		1 Dokumen	1 Dokumen	100%				
3	08	06	2	02	0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		1 Dokumen	1 Dokumen	100%				

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2027)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2025			Target Program / Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian		
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2026		Catatan
													Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat capaian (%)	
1						2	3	4	5	6	7=(7/6)*100	8	9	10=(10/5)*100	11
2	08	06	2	02	0005	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek					240 Orang	240 Orang	100%	
2	08	06	2	02	0008	monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					1 Laporan	1 Laporan	100%	
2	08	06	2	02	0007	Kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	240 Lembaga							
2	08	06	2	02	0013	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Lembaga tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	12 Lembaga							
2	08	07				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Indeks Perlindungan Khusus Anak	88,8 Indeks	83,5 Indeks	83,52 Indeks	100%	83,6 Indeks	83,6 Indeks	100%	
							Persentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan Layanan Komprhensif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	08	07	2	01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup DaerahKabupaten/Kota	Persentase Kasus Kekerasan Anak yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	08	07	2	01	0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA		240 Orang	240 Orang	100%				
2	08	07	2	01	0006	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentinganKewenangan	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIA					1 Dokumen	1 Dokumen	100%	

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Ranstra SKPD Tahun 2027)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2025			Target Program / Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian		Catatan
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2026		
													Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat capaian (%)	
1						2	3	4	5	6	7=(7/6)*100	8	9	10=(10/5)*100	11
2	08	07	2	01	0014	Kabupaten/Kota	Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kab/Kota	1 Kegiatan							
2	08	07	2	03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	08	07	2	03	0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK		90 Orang	90 Orang	100%				
2	14					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGABERENCANA									
2	14	02				PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Kehamilan Tidak direncanakan (KTD)	10,2%	10,30%%	10,1%	98,05%	10,3%	10,3%	100%	
							Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	14 Angka	14,8 Angka	21,5 Angka		14,4 Angka	14,4 Angka	100%	
2	14	02	2	01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase Program Prioritas Kabupaten/Kota yang mengacu pada Program Prioritas Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	14	02	2	01	0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota		2 Dokumen	2 Dokumen	100%				

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2027)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2025			Target Program / Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian		
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2026		Catatan
													Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat capaian (%)	
1						2	3	4	5	6	7=(7/6)*100	8	9	10=(10/5)*100	11
2	14	02	2	01	0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal		1 SSK	1 SSK	100%				
2	14	02	2	01	0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	10 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	100%	10 Kegiatan	10 Kegiatan	100%	
2	14	02	2	01	0027	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal					1 SSK	1 SSK	100%	
2	14	02	2	01	0055	Advokasi, promosi, dan pembinaan edukasi kependudukan pada Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di satuan pendidikan jenjang SD/ sederajat dan SMP/ Pramuka Peduli Kependudukan (Pramuka PK) di kwartir ASN Peduli Kependudukan (ASN PK) di lembaga kediklatan/OPD kabupaten/ serta Masyarakat Peduli Kependudukan (Mass PK) di Kampung KB/Ormas pengelola kelompok kegiatan masyarakat.	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan advokasi, promosi, dan pembinaan edukasi kependudukan pada Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di satuan pendidikan jenjang SD/ sederajat dan SMP/ Pramuka Peduli Kependudukan (Pramuka PK) di kwartir ASN Peduli Kependudukan (ASN PK) di lembaga kediklatan/OPD kabupaten/ serta Masyarakat Peduli Kependudukan (Mass PK) di Kampung KB/Ormas pengelola kelompok kegiatan masyarakat.	1 Laporan / Dokumen							
2	14	02	2	02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data KB yang dilaporkan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	14	02	2	02	0006	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak		3 Dokumen	3 Dokumen	100%				

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2027)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2025			Target Program / Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian		Catatan
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat capaian (%)	
1						2	3	4	5	6	$7 = (7/6) \times 100$	8	9	$10 = (10/5) \times 100$	11
							Kependudukan								
2	14	02	2	02	0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%				
2	14	02	2	02	0009	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga		12 Laporan	12 Laporan	100%				
2	14	02	2	02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	
2	14	02	2	02	0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangsa Kencana	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%	
2	14	02	2	02	0024	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan		3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	
2	14	03				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mCPR)	79,6 Angka	79,5 Angka	79,33 Angka	100%	79,55 Angka	79,55 Angka	100%	
							Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	3,43%	4,34%	3,80%	87,56%	3,43%	3,89%	100%	
2	14	03	2	01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Peningkatan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) setelah KIE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	14	03	2	01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)			10 Laporan	10 Laporan	100%			

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2027)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2025			Target Program / Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian		Catatan
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat capaian (%)	
1						2	3	4	5	6	$7 = (7/6) \times 100$	8	9	$10 = (10/5) \times 100$	11
2	14	03	2	01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)			10 Laporan	10 Laporan	100%			
2	14	03	2	01	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100%	
3	14	03	2	01	0013	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja			4 Organisasi	4 Organisasi	100%			
2	14	03	2	02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Cakupan KB Aktif	79,60%	79,50%	79,33%	100%	79,55%	79,55%	100%	
							Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi Menurut Alat/Cara KB Modern	90,75%			100%			100%	
2	14	03	2	02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	950 Orang	938 Orang	893 Orang	95%	950 Orang	950 Orang	100%	
2	14	03	2	03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Permintaan Kontrasepsi yang terpenuhi Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	14	03	3	03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan		1 Laporan	1 Laporan	100%				

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2027)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2025			Target Program / Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian		Catatan
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat capaian (%)	
1						2	3	4	5	6	$7 = (7/6) \times 100$	8	9	$10 = (10/5) \times 100$	11
							Jejarinya								
2	14	03	2	03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	952 Orang	510 Orang	588 Orang	100%	952 Orang	952 Orang	100%	
2	14	03	2	03	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	5 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	5 Unit	5 Unit	100%	
2	14	05	4	03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarinya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarinya		2 Laporan	2 Laporan	100%				
2	14	03	2	04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	100%	100%	100%	100%				
2	14	03	3	04	0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		6 Organisasi	6 Organisasi	100%				
2	14	04	3	04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		52 Kampung	52 Kampung	100%				

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2027)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2025			Target Program / Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian		Catatan	
								Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2026			
												Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat capaian (%)		
1					2	3	4	5	6	7=(7/6)*100	8	9	10=(10/5)*100	11	
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks Lansia Berdaya	67,55 Indeks	67,3 Indeks	67,3 Indeks	100%	67,55 Indeks	67,55 Indeks	100%		
						Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja	88,9 Indeks	88,8 Indeks	88,8 Indeks	100%	88,9 Indeks	88,9 Indeks	100%		
						Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
2	14	04	2	01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan KesejahteraanKeluarga	Persentase Kelompok Kegiatan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga yang Aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
2	14	04	2	01	0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)		7 Laporan/ Dokumen	7 Laporan/ Dokumen	100%				
2	14	04	2	01	0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	2 Laporan	100%	
2	14	04	2	01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang tersedia		10 Unit	10 Unit	100%				
2	14	04	2	02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat DaerahKabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan danKesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok Tribina yang Aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
						Jumlah Calon Pengantin Mendapatkan Bimbingan Perkawinan dengan Materi Stunting	86%	77,50%	91,37%	100%	87%	87%	100%		
						Persentase Kelompok Sasaran Mendapatkan Pendampingan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK)	78%	77,50%	76,08%	98,17%	78%	78%	100%		

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2027)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2025			Target Program / Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian		
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2026		Catatan
													Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat capaian (%)	
1						2	3	4	5	6	7=(7/6)*100	8	9	10=(10/5)*100	11
2	14	04	2	02	0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja		1 Laporan	1 Laporan	100%				
2	14	04	2	02	0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)		1 Laporan	1 Laporan	100%				
2	14	04	2	02	0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan		1 Laporan	1 Laporan	100%				
2	14	04	2	02	0008	Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	1 Laporan				1 Laporan	1 Laporan	100%	
						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANANDASAR									
2	08					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DANPERLINDUNGAN ANAK									
2	08	03				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan komprehensif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	08	03	2	02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yangMemerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang menerima Layanan Rujukan Lanjutan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	08	03	2	02	0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan		20 Orang	20 Orang	100%				

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2027)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2025			Target Program / Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian		Catatan
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2026		
													Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat capaian (%)	
1						2	3	4	5	6	$7 = \frac{(7/6) \times 100}{0}$	8	9	$10 = \frac{(10/5) \times 100}{00}$	11
2	08	03	2	02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		20 Layanan	20 Layanan	100%				
2	08	03	2	02	0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota					20 Orang	20 Orang	100%	
2	08	03	2	02	0010	Layanan Pendampingan Korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	21 Orang							
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Indeks Perlindungan Khusus Anak	88,8 Indeks	83,6 Indeks	83,52 Indeks	100%	83,6 Indeks	83,6 Indeks	100%		
						Persentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan Layanan Komprhensif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
2	08	07	2	02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Anak Korban Kekerasan yang menerima Layanan Perlindungan Khusus	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	08	07	2	02	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan		44 Orang	44 Orang	100%				
2	08	07	2	02	0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan		44 Layanan	44 Layanan	100%				
2	08	07	2	02	0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota					47 Orang	47 Orang	100%	

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2027)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2025			Target Program / Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian		Catatan
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2026		
													Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat capaian (%)	
1						2	3	4	5	6	7=(7/6)*100	8	9	10=(10/5)*100	11
2	08	07	2	02	0016	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Daerah Kab/Kota	47 Orang							

B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Memperhatikan hasil analisis Akuntabilitas kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong secara makro pelaksanaan program dan kegiatan telah terlaksana dengan baik, hal ini dapat terlihat dari capaian sasaran maupun indikator yang menjadi target dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025:

1. Dinas Sosial dari 3 Sasaran strategis dan 3 indikator dengan tingkat capaian sebagai berikut:
 - a. Capaian > 100% Sangat Baik (A) : -
 - b. Capaian 76% - 100% Baik (B) : 3 Indikator Kinerja Sasaran
 - c. Capaian 56% - 75% Cukup © : -
 - d. Capaian < 55% Kurang (K) :-
2. Dinas Pemeberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dari 4 Sasaran strategis dan 5 indikator dengan tingkat capaian sebagai berikut:
 - a. Capaian > 100% Sangat Baik (A) : -
 - b. Capaian 76% - 100% Baik (B) : 5 Indikator Kinerja Sasaran
 - c. Capaian 56% - 75% Cukup © : -
 - d. Capaian < 55% Kurang (K) :-

Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak, baik dari sisi manajemen dan pengelolaan anggaran diperlukan pencermatan yang lebih baik.

Analisis kinerja pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana akan membaik apabila didukung oleh:

1. Pegawai yang berkualitas;
2. Pegawai yang cukup;
3. Sarana dan Prasarana yang lengkap

Adapun hambatan yang terjadi:

1. Perubahan SOTK memerlukan penyesuaian terhadap dokumen perencanaan seperti Renstra, Renja, hingga DPA. Proses ini memakan waktu dan memerlukan sinkronisasi ulang;

2. Perubahan struktur menyebabkan rantai koordinasi dan pelaporan pegawai membutuhkan waktu untuk memahami alur komando yang baru sehingga pada awalnya proses pengambilan keputusan bisa melambat.

Tabel 2.2

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Tabalong**

No	Indikator	IKU/SPM/NSPK/IKK/SDGs	Target				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)											
1	Persentase PPKS yang telah Pulih Fungsi Sosialnya	IKU	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
2	Nilai dalam Kabupaten / Kota Layak Anak	IKU	650 Nilai	725 Nilai	750 Nilai	775 Nilai	600 Nilai		750 Nilai	775 Nilai	
3	Persentase Penyelesaian Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak	IKU	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
4	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	IKU	2,18 Angka	2,17 Angka	2,16 Angka	2,15 Angka	2,18 Angka		2,16 Angka	2,15 Angka	
5	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	IKU	BB	BB	A	A	A		A	A	
INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) OUTCOME											
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar											
1	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	IKK	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
2	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	IKK	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
3	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	IKK	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
4	Persentase Gelandangan dan Pengemis	IKK	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	

No	Indikator	IKU/SPM/NSPK/IKK/SDGs	Target				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti										
5	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/ atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Kabupaten / Kota	IKK	78%	79%	80%	80%	80%		80%	80%	
6	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	IKK	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar											
1	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	IKK	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
2	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	IKK	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
3	Angka Kelahiran Total (<i>Total fertility Rate/TFR</i>) per Wanita Usia Subur usia 15-49 Tahun)	IKK	2,18 Angka	2,17 Angka	2,16 Angka	2,15 Angka	2,18 Angka		2,16 Angka	2,15 Angka	
4	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern / Modern Contraceptiva Prevalence Rate(mCPR)	IKK	79,50%	79,55%	79,60%	79,65%	79,33%		79,60%	79,65%	
5	Persentase Kebutuhan ber -Keluarga Berencana yang tidak Terpenuhi (Unmeet Need)	IKK	4,34%	3,89%	3,43%	2,98%	3,80%		3,43%	2,98%	

Ruang lingkup strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Tabalong tidak terlepas dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong mempunyai kewenangan untuk menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak dan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Sasarannya adalah individu, keluarga, organisasi dan komunitas yang memerlukan pelayanan sosial.

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) mengacu pada amanat Peraturan Menteri Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, terdapat kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu pelayanan Dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal. SPM bidang sosial merupakan penjabaran dari target yang telah dipandu oleh Kementerian Sosial dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota mencakup 5 pelayanan dasar, yaitu:

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti;
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti;
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti;
4. Rehabilitasi Sosial dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis di Luar Panti; dan
5. Perlindungan dan jaminan Sosial pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan SPM bidang sosial tahun 2025 didukung oleh anggaran sebesar :

1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan anggaran sebesar Rp. 5.584.500.000,- realisasi sebesar Rp. 5.398.350.000,- target penerima manfaat sebanyak 493 tercapai 100%.
2. Program Penanganan Bencana dengan anggaran sebesar Rp. 194.004.400,- realisasi sebesar Rp. 169.748.551,- target penerima manfaat sebanyak 1.000 orang tercapai 100%.
3. Program Rehabilitasi Sosial dengan anggaran sebesar Rp.3.482.485.436,- realisasi sebesar Rp. 3.013.089.549,- target penerima manfaat sebanyak 858 tercapai 100%

Permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan SPM bidang Sosial Tahun 2025 adalah:

1. Belum optimalnya pemberian perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah;

2. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan pelayanandasar anak terlantar, keluarga miskin, lanjut usia terlantar dan penyandang cacat;
3. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar anak, anak yang menjadi korban tindak kekerasan, penyandang disabilitas, pengemis dan gelandangan;
4. Untuk mendukung kebijakan-kebijakan peningkatan target dan capaian SPM perlu penyediaan fasilitas fisik dan non fisik sesuai dengan Permensos 16 Tahun 2029 tentang Rehabilitasi Sosial.

Beberapa solusi yang akan dilakukan terkait permasalahan-permasalahan tersebut adalah:

1. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait serta lintas daerah terkait dengan penanganan pasca bencana dan penanganan PMKS;
2. Meningkatkan kualitas hidup PMKS melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan PMKS dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
3. Mengajukan usulan untuk melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dimaksud.

D. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Penyandang masalah kesejahteraan sosial adalah kelompok masyarakat yang menghadapi tantangan dan kesulitan khusus dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Beberapa isu strategis yang berkaitan dengan penyandang masalah kesejahteraan sosial melibatkan kebijakan dan program - program untuk membantu mereka melewati situasi sulit. Berikut adalah beberapa isu strategis yang relevan:

1. Kemiskinan dan Pengangguran: Banyak penyandang masalah kesejahteraan sosial menghadapi risiko kemiskinan dan kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang layak. Program-program yang membantu mereka mengakses pelatihan keterampilan, mendapatkan pekerjaan, atau memberikan dukungan keuangan dapat membantu mengatasi isu ini;
2. Perumahan dan ketersediaan Rumah: Masalah perumahan seringkali menjadi kendala bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial. Kebijakan perumahan yang terjangkau, program bantuan perumahan dan upaya untuk mengatasi tunawisma menjadi isu strategis dalam konteks ini;
3. Kesehatan Mental dan Fisik: Banyak Penyandang masalah kesejahteraan sosial menghadapi tantangan dalam hal kesehatan mental dan fisik. Layanan kesehatan mental yang terjangkau dan dukungan kesehatan yang holistik menjadi isu kritis;
4. Pendidikan dan Keterampilan: Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan sangat penting untuk membantu penyandang masalah

- kesejahteraan sosial meningkatkan peluang mereka di pasar kerja. Kebijakan pendidikan inklusif dan program pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan mereka menjadi isu strategis;
5. Diskriminasi dan Stigma: Penyandang masalah kesejahteraan sosial sering menghadapi diskriminasi dan stigma sosial yang dapat menghambat integrasi mereka dalam masyarakat. Upaya untuk mengatasi diskriminasi dan mengedukasi masyarakat tentang isu-isu ini menjadi isu strategis penting;
 6. Keamanan Sosial: Perlindungan sosial dan jaringan keamanan sosial menjadi isu strategis dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi atau situasi kritis. Program bantuan sosial yang efektif dapat membantu menyediakan perlindungan finansial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 7. Kekerasan dan Keamanan: Penyandang masalah kesejahteraan sosial mungkin rentan terhadap situasi kekerasan atau ketidakamanan. Membangun lingkungan yang aman dan memberikan dukungan bagi mereka yang menghadapi kekerasan adalah isu strategis;
 8. Partisipasi Masyarakat: Penting untuk memastikan bahwa penyandang masalah kesejahteraan sosial memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan masyarakat. Memperkuat partisipasi dalam pengambilan keputusan lokal dan nasional menjadi isu strategis;
 9. Keterlibatan Keluarga dan Jaringan Dukungan: Membangun dan memperkuat jaringan dukungan sosial, termasuk peran keluarga adalah penting bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial. Program dukungan keluarga dan pemberdayaan komunitas menjadi isu strategis dalam konteks ini;
 10. Akses Layanan Sosial dan Hukum: Memastikan akses yang mudah dan adil ke layanan sosial, kesehatan, dan hukum adalah isu strategis. Hal ini mencakup upaya untuk menghilangkan hambatan administratif dan memastikan bahwa semua warga memiliki akses yang setara ke layanan tersebut;
 11. Isu Inklusif disabilitas menjadi sorotan penting dalam upaya menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadilan. Inklusivitas disabilitas bukan hanya tentang memahami dan mengakui keberagaman kondisi fisik dan mental, tetapi setara bagi semua individu, tanpa memandang kondisi disabilitas mereka. Saat kita merenungi perjalanan seseorang yang hidup dengan disabilitas, kita menyadari bahwa inklusivitas bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi suatu prinsip yang mendefinisikan kemanusiaan kita bersama. Ini adalah panggilan untuk menyusun fondasi masyarakat yang memahami, menghargai, dan mendukung perbedaan.

Namun, upaya inklusif tidak hanya berkutat pada aspek fisik dan pendidikan. Masyarakat perlu memberikan dukungan emosional dan sosial yang memadai bagi individu dengan disabilitas. Stigma dan diskriminasi harus dihadapi dan diubah, menciptakan ruang di mana setiap orang merasa diterima tanpa syarat.

Mengatasi isu-isu strategis ini memerlukan pendekatan yang holistik dan kolaboratif dari pemerintah, lembaga swasta, masyarakat sipil, dan individu untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dan inklusif.

Secara umum isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Sosial, pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong dalam kurun waktu tahun 2025, adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya Penanganan Masalah kesejahteraan Sosial
 - a. Masih rendahnya Kualitas hidup PPKS yang belum mendapatkan pelayanan Sosial;
 - b. Belum maksimalnya peran PSD dan partisipasi lembaga swasta dalam penanganan PPKS;
 - c. Rendahnya tingkat kesejahteraan fakir miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar;
 - d. Masih banyaknya warga miskin yang belum terdaftar di Basis Data Terpadu;
 - e. Rendahnya tingkat keasdasan masyarakat terhadap penyebab bencana
- Permasalahan PMKS ini mengacu pada rendahnya kualitas hidup Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang perlu mendapatkan pelayanan sosial ini diantaranya keterlambatan, kemiskinan, kecacatan, bencana alam dan sosial serta ketunaan.
2. belum optimalnya kesetaraan dan keadilan gender, yang disebabkan oleh masih rendahnya peran perempuan dalam pembangunan sebagai akibat dari belum optimalnya pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan keterampilan kepemimpinan, manajemen dan negosiasi, belum optimalnya peran dan keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif, belum optimalnya partisipasi politik perempuan, serta belum optimalnya akses perempuan terhadap peluang karir dan pendidikan dan masih terjadinya kekerasan pada perempuan, baik fisik, seksual, maupun emosional karena belum optimalnya upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan secara komprehensif.

3. belum optimalnya pencegahan pernikahan usia dini sebagai bagian dari perlindungan hak anak dan kesetaraan gender, yang disebabkan oleh belum optimalnya sistem perlindungan anak dalam mencegah pernikahan usia dini sebagai akibat dari belum optimalnya layanan perlindungan anak yang responsif dan mudah diakses, kurangnya edukasi dan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan anak, keterbatasan akses pendidikan bagi anak perempuan, belum optimalnya pemberdayaan ekonomi keluarga dan budaya yang masih mendukung pernikahan dini, serta belum optimalnya implementasi aturan terkait batas usia pernikahan.
4. belum optimalnya pelaksanaan program keluarga berencana dan pembangunan keluarga, yang disebabkan oleh masih tingginya laju pertumbuhan penduduk sebagai akibat dari belum optimalnya akses, edukasi, dan pemberdayaan perempuan dalam kesehatan reproduksi dan kontrasepsi, masih adanya angka kehamilan yang tidak diinginkan serta masih adanya pernikahan usia dini.

Tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong:

1. Tantangan

- a. Meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha bagi PMKS;
- b. Memperkuat peran PMKS dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar;
- c. Mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang memungkinkan PMKS dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasarnya dan meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan;
- d. Memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan;
- e. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadi hambatan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender;
- f. Kesadaran dan peran serta keluarga, masyarakat dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak masih rendah;
- g. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- h. Penggunaan media sosial dan aplikasi online anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi

tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan;

- i. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak;
- j. Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

2. Peluang

- a. Adanya kerjasama dengan pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial, seperti LSM< CSR Perusahaan, serta perorangan atau lembaga-lembaga lain yang peduli terhadap penanganan PMKS;
- b. Adanya kader penanggulangan kemiskinan yang fungsinya sebagai pendamping sosial bagi PMKS dalam mengakses berbagai informasi dan sumber pelayanan yang ada;
- c. Kebijakan yang responsif dan mengarah pada jaminan sosial bukan bantuan sosial bagi PMKS yang tidak potensial, seperti lanjut usia miskin dan penderita cacat berat;
- d. Peningkatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terus dilakukan sebagai upaya memperkuat fungsi kelembagaan tersebut dalam upaya pembangunan kesejahteraan sosial;
- e. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah;
- f. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak;
- g. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak;
- h. Adanya dukungan dari berbagai pihak eksternal maupun internal dalam membangun bersama untuk mengatasi permasalahan dalam urusan sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Pemerintah telah menetapkan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJPN) 2025-2045 sebagai pedoman pembangunan negara dalam kurun waktu tersebut. RPJPN merupakan penjabaran dari visi, misi dan program presiden. Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2025-20245 adalah:

"NEGARA NUSANTARA BERDAULAT, MAJU DAN BERKELANJUTAN".

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 8 Misi, yaitu:

1. Mewujudkan transformasi sosial;
2. Mewujudkan transformasi ekonomi;
3. Mewujudkan transformasi tata kelola;
4. Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan ketangguhan diplomasi;
5. Memantapkan Ketahanan Sosial budaya dan ekologi;
6. Pembangunan Kewilayahan;
7. Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan;
8. Kestinambungan Pembangunan.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial ialah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.

Tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial menurut UU Nomor 11 Tahun 2009, sebagai berikut:

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan kualitas, dan kelangsungan hidup;
2. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
4. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;

5. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan, dan
6. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial sebagai berikut:

1. Kemiskinan yaitu kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan;
2. Ketelantaran, yaitu pengabaian/penelantaran anak – anak dan orang lanjut usia karena berbagai sebab atau kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan fisik, psikis, dan sosial secara wajar yang disebabkan oleh ketidakmampuan sosial ekonom, dan pengabaian terhadap tugas dan tanggung jawab;
3. Kecacatan, yaitu hilang/terganggunya fungsi fisik atau kondisi abnormalitas fungsi struktur anatomi psikologi maupun fisiologis;
4. Keterpencilan, yaitu isolasi alam yang berakibat pada ketertinggalan yang dialami oleh komunitas adat terpencil atau kondisi kehidupan komunitas sosial budaya lokal yang tinggal pada lokasi yang terisolir secara geografis dan sulit terjangkau serta belum ada kontak (interaksi) dengan dunia luar;
5. Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, yaitu merupakan indikasi atas ketidakberhasilan fungsi sosial seseorang, yakni tergantungnya salah satu atau lebih fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, emosi, konsep diri dan juga kebutuhan religius, rekreasi dan pendidikan seseorang atau kondisi penyimpangan atau pelanggaran terhadap nilai dan norma sosial, moral dan etika yang berlaku di masyarakat;
6. Korban bencana, yaitu perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental, maupun sosial ekonomi sebagai akibat dari terjadinya bencana yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya, dan/atau;
7. Korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, yaitu orang (baik individu, keluarga atau kelompok) yang mengalami tindak kekerasan, baik dalam bentuk penelantaran, perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya maupun orang yang berada dalam situasi yang membahayakan dirinya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat meliputi:

1. Rehabilitasi sosial, yaitu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat;

2. Jaminan sosial yaitu skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;
3. Pemberdayaan sosial yaitu semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya;
4. Perlindungan sosial yaitu semua upaya yang diarahkan untuk menceha dan menangani resiko dari guncangan dan kekerasan sosial.

Selaras dengan RPJPN, Tema Pembangunan Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2025 adalah "Tabalong Terdepan, Maju dan Berkelanjutan"

Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong Tahun 2027 merupakan penjabaran dari RPJPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2045. Visi Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

"TABALONG TERDEPAN, MAJU DAN BERKELANJUTAN"

Visi ini adalah keadaan yang ingin dicapai Kabupaten Tabalong untuk dapat mewujudkan kualitas kehidupan yang semakin baik, maju, dan bedaya saing tinggi. Kemajuan yang dicapai membawa Kabupaten Tabalong menjadi daerah yang berdaya ungkit tinggi bagi keberhasilan pembangunan di Kalimantan Selatan terutama dikaitkan dengan posisi sebagai gerbang logistik di Pulau Kalimantan dan daerah yang berdampingan dengan IKN.

Sedangkan Visi RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

"MENUJU TABALONG SMAaRT (SEJAHTERA< MAJU< RELIGIUS DAN TERDEPAN)"

aengan misi sebagai berikut:

- MISI 1 : Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera
- MISI 2 : Mendorong Kemajuan Daerah
- MISI 3 : Mengembangkan Kehidupan yang Religius
- MISI 4 : Menjadi Daerah yang Terdepan

Kebijakan Nasional dan Provinsi untuk Pemberdayaan Perempuan diharapkan adanya Kesetaraan Gender. Kemudian untuk Perlindungan Anak diharapkan terpenuhinya hak-hak dan perlindungan terhadap anak, Dalam rangka pengendalian penduduk dan peningkatan kualitas penduduk diperlukan peningkatan pelayanan Keluarga Berencana (KB). Kebijakan pemerintah pusat dan provinsi yang telah tertuang dalam kebijakan nasional sudah dituangkan dalam kebijakan pemerintah daerah pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Sosial, pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga

Berencana berdasarkan UU No.52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No. 01/Meneg-PP/V/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI yang diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No. 02/Meneg.PP/IX/2007, Instruksi Presiden No. 3 Tahun 1996 tentang Pembangunan Keluarga Sejahtera dalam rangka peningkatan penanggulangan kemiskinan, Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong (Berita Daerah kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47).

B. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Adapun tujuan dari Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong adalah *"Menurunnya Keparahan Kemiskinan serta Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan dan Kualitas Ketahanan Keluarga"*.

Sedangkan sasaran yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Perlindungan Sosial;
2. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
4. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah.

Tabel 3.1

Prioritas dan Sasaran

**Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran SKPD	Indikator Sasaran SKPD (OUTCOME)
1	2	3	4	5	6
1.	Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera	Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Terkendalinya Ketimpangan	Persentase Penduduk Miskin Indeks Gini	Meningkatnya Perlindungan Sosial	Persentase PPKS yang telah Pulih Fungsi Sosialnya
2.	Mengembangkan Kehidupan yang Religius	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Nilai dalam Kabupaten / Kota Layak Anak Persentase Penyelesaian Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak
				Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Total (Total Fertility Rate / TFR)
				Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah

Tabel 3.2

Tujuan

**Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

No	Tujuan SKPD	Indikator Tujuan SKPD	Target Kinerja SKPD Tahun 2027
1	2	3	4
1.	Menurunnya Keparahan Kemiskinan serta Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan dan Kualitas Ketahanan Keluarga	Indeks Keparahan Kemiskinan	100%
		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,408 Indeks
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	65,6 Indeks
		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	67,4 Indeks
		Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	72 Indeks

Tabel 3.3

Sasaran

**Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

No	Sasaran SKPD	Indikator Sasaran SKPD	Target Kinerja SKPD Tahun 2027
1	2	3	4
1	Meningkatnya Perlindungan Sosial	Persentase PPKS yang telah Pulih Fungsi Sosialnya	100%
2.	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Nilai dalam Kabupaten / Kota Layak Anak	750 Nilai
		Persentase Penyelesaian Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak	100%
3.	Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate / TFR)	2,17 Angka
4.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	A

Tabel 3.4

Indikator Kinerja Utama

**Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja
1	Meningkatnya Perlindungan Sosial	Persentase PPKS yang telah Pulih Fungsi Sosialnya	100%
2	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Nilai dalam Kabupaten / Kota Layak Anak	750 Nilai
		Persentase Penyelesaian Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak	100%
3	Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate / TFR)	2,16 Angka
4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	A

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikator sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Tabalong.

Rencana program, kegiatan dan pendanaan indikatif adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

**Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong**

	Sasaran SKPD	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
1.	Meningkatnya Kelancaran dan Fungsi Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapannya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

Sasaran SKPD		Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.	Meningkatnya Perlindungan Sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
		Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
		Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
		Sub Kegiatan Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan
		Sub Kegiatan Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial
		Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota

Sasarn SKPD	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan
	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang
	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu
	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
	Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan
	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota
	Sub Kegiatan Penyediaan Perbekalan Kesehatan
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
	Sub Kegiatan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Sasarn SKPD	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
	Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
	Sub Kegiatan Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
	Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan DaerahKabupaten/Kota
	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan EkonomiMasyarakat
	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan DaerahKabupaten/Kota
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA
	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan
	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang
	Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
	Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial
	Sub Kegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan BencanaKabupaten/Kota
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan KampungSiaga Bencana
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna SiagaBencana
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna SiagaBencana Tingkat Muda
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana
	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagiKorban Bencana
	Sub Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencanapada Anak Usia Sekolah
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM

Sasarn SKPD		Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
		PAHLAWAN
		Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
3.	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
		Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
		Sub Kegiatan Advokasi dan sosialisasi terkait penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota
		Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
		Sub Kegiatan Bimbingan teknis dan pendampingan SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota
		Sub Kegiatan Advokasi dan sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan/atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota
		Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
		Sub Kegiatan Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kab/Kota
		Sub Kegiatan Kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kab/Kota
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
		Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
		Sub Kegiatan Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak

Sasarn SKPD	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
	Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kab/Kota
	Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
	Sub Kegiatan Layanan Pendampingan Korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota
	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Sub Kegiatan Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Sub Kegiatan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.
	Sub Kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
	Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

Sasaran SKPD	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
	Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak DalamKelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Sub Kegiatan Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kab/Kota
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
	Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia UsahaKewenangan Kabupaten/Kota
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis dan Sub Kegiatan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas HidupAnak Kewenangan Kabupaten/Kota
	Sub Kegiatan Kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota
	Sub Kegiatan Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
	Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup DaerahKabupaten/Kota
	Sub Kegiatan Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kab/Kota
	Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yangMemerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Sub Kegiatan Layanan pendampingan korban bagi

	Sasaran SKPD	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
		Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota
4.	Meningkatnya Pengendalian Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
		Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana
		Sub Kegiatan Advokasi, promosi, dan pembinaan edukasi kependudukan pada Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di satuan pendidikan jenjang SD/ sederajat dan SMP/ Pramuka Peduli Kependudukan (Pramuka PK) di kwartir ASN Peduli Kependudukan (ASN PK) di lembaga kediklatan/OPD kabupaten/ serta Masyarakat Peduli Kependudukan (Mass PK) di Kampung KB/Ormas pengelola kelompok kegiatan masyarakat.
		Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
		Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
		Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
		Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
		Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
		Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal

Sasarn SKPD	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
	Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
	Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
	Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
	Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
	Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))
	Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
	Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga

Tabel 4.2

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2027

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2027				Catatan	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2028	
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu Indikatif)	Sumber		Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu Indikatif)
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
1	06	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA DAERAH	Predikat Nilai AKIP	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	A	20.170.179.137	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		A	21.199.656.587
1	06	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Hasil Perencanaan dan Pelaporan yang dijadikan Bahan Evaluasi Kinerja	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	100%	99.419.597	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	104.390.575
1	06	01	2	01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	14 Laporan	68.806.899	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		14 Laporan	72.247.243

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2027				Catatan	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2028	
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu Indikatif)	Sumber		Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu Indikatif)
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	06	01	2	01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	4 Dokumen	4.500.071	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 Dokumen	4.725.074
1	06	01	2	01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	4 Data	26.112.627	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 Data	27.418.258
1	06	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang Tertib, Akuntabel dan Tepat Waktu	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	100%	13.050.819.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	13.703.359.950
1	06	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	57 Orang	13.050.819.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		57 Orang	13.703.359.950
1	06	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu, Mutakhir dan Terdokumentasi	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	100%	45.670.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	47.954.025
1	06	01	2	05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan,	1 Paket	45.670.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Paket	47.954.025

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2027				Catatan	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2028	
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu Indikatif)	Sumber		Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu Indikatif)
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
								Semua Kelurahan/ Desa						
1	06	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum yang Terlaksananya Sesuai SOP	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	100%	877.336.443	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	921.203.263
1	06	01	2	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	2 Paket	17.493.016	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Paket	18.367.666
1	06	01	2	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	12 Paket	119.072.973	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Paket	125.026.621
1	06	01	2	06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	2 Paket	34.360.853	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Paket	36.078.895
1	06	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	20 Paket	59.640.440	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20 Paket	62.622.462
1	06	01	2	06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan,	12 Dokumen	5.816.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Dokumen	5.896.800

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2027				Catatan	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2028	
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu Indikatif)	Sumber		Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu Indikatif)
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
								Semua Kelurahan/ Desa						
1	06	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	70 Laporan	641.153.161	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		70 Laporan	673.210.819
1	06	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik daerah yang sesuai dengan yang direncanakan	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	100%	501.199.348	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	526.259.314
1	06	01	2	07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	35 Unit	63.386.070	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		35 Unit	66.555.373
1	06	01	2	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	5 Unit	252.728.278	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5 Unit	265.364.691
1	06	01	2	07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	1 Unit	185.085.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Unit	194.339.250
1	06	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Kabupaten Tabalong, Semua	100%	3.874.487.073	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	4.089.211.426

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2027				Catatan	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2028	
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu Indikatif)	Sumber		Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu Indikatif)
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
							yang di Fasilitas/ Disediakan	Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa						
1	06	01	2	08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	24 Laporan	4.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		24 Laporan	4.725.000
1	06	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	48 Laporan	257.860.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		48 Laporan	270.543.000
1	06	01	2	08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	24 Laporan	50.571.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		24 Laporan	53.099.550
1	06	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	48 Laporan	3.561.756.073	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		48 Laporan	3.760.543.876
1	06	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang yang dipelihara dan berfungsi sesuai Kondisi Standar	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	100%	1.721.247.176	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	1.807.278.034

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2027				Catatan	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2028	
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu Indikatif)	Sumber		Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu Indikatif)
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	06	01	2	09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	55 Unit	780.080.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		55 Unit	798.053.130
1	06	01	2	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	35 Unit	7.272.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		35 Unit	7.635.600
1	06	01	2	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	2 Unit	953.894.575	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Unit	1.001.589.304
1	06	2				PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang Berkontribusi dalam Proses Penanganan PPKS	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	100%	3.011.285.602	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	3.161.849.850
1	06	02	2	03		Pengembangan Kesejahteraan Kabupaten/Kota	Potensi Sosial	Sumber Daerah	Jumlah PPKS yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	3.011.285.602	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.161.849.850
1	06	02	2	03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	2 Lembaga	297.413.190	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Lembaga	312.283.849

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2027				Catatan	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2028	
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu Indikatif)	Sumber		Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu Indikatif)
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
								Kelurahan/ Desa						
1	06	02	3	03	0010	Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	30 Orang	354.161.156	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30 Orang	371.869.213
1	06	02	3	03	0011	Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	38 Orang	228.562.456	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		38 Orang	239.990.578
1	06	02	2	03	0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	100 Orang	2.131.148.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100 Orang	2.237.706.240
1	06	04				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang Memperoleh Rehabilitas Sosial Dasar sesuai Standar Muta	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	100%	3.979.395.649	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	4.178.365.429

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2027				Catatan	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2028	
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu Indikatif)	Sumber		Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu Indikatif)
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	06	04	2	01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS SPM yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	100%	3.529.912.429	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	3.706.408.048
1	06	04	2	01	0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	4.950 Orang	2.953.220.056	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4.950 Orang	3.100.881.060
1	06	04	2	01	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	1865 Orang	210.546.333	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1865 Orang	221.073.649
1	06	04	2	01	0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	63 Orang	144.581.918	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		63 Orang	151.811.013
1	06	04	2	01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	21 Orang	5.592.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		21 Orang	5.872.230
1	06	04	2	01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	10 Orang	5.850.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10 Orang	6.142.500

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2027				Catatan	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2028	
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu Indikatif)	Sumber		Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu Indikatif)
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	06	04	2	01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	90 Orang	94.137.620	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		90 Orang	98.844.501
1	06	04	2	01	0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	67 Orang	31.050.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		67 Orang	32.602.500
1	06	04	2	01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	140 Orang	7.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		140 Orang	7.560.000
1	06	04	2	01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	20 orang	30.960.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20 orang	32.508.000
1	06	04	2	01	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	3 Orang	5.013.900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 Orang	5.264.595
1	06	04	2	01	0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	105 orang	32.040.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		105 orang	33.842.000

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2027				Catatan	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2028	
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu Indikatif)	Sumber		Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu Indikatif)
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
								Kelurahan/ Desa						
1	06	04	2	01	0014	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	16 Orang	5.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		16 Orang	5.870.000
1	06	04	2	01	0017	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	12 Orang	4.320.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Orang	4.536.000
1	06	04	2	02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS Non SPM yang Mendapatkan Pelayanan dan Pembinaan	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	100%	449.483.220	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	471.957.381
1	06	04	2	01	0017	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	10 Dokumen	449.483.220	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10 Dokumen	471.957.381
1	06	05				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Keluarga Miskin yang Menerima Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	100%	17.169.111.734	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	18.027.567.320
							Persentase Keluarga Miskin yang Memperoleh Bantuan Sosial		100%				100%	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2027				Catatan	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2028	
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu Indikatif)	Sumber		Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu Indikatif)
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	06	05	2	01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak Panti yang Mendapatkan Bantuan	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	510 Orang	3.704.364.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		510 Orang	3.889.582.200
1	06	05	2	01	0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	510 Orang	3.704.364.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		510 Orang	3.889.582.200
1	06	05	2	02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PPKS yang Mendapatkan Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	15000 Orang	13.464.747.734	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15000 Orang	14.137.985.120
1	06	05	2	02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	15000 Orang	260.007.120	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15000 Orang	273.007.476
1	06	05	2	02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	120 Orang	362.350.080	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		120 Orang	380.467.584
1	06	05	2	02	0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua	15000 Orang	12.498.674.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15000 Orang	13.123.608.120

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2027				Catatan	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2028	
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu Indikatif)	Sumber		Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu Indikatif)
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
							Kabupaten/Kota	Kelurahan/ Desa						
1	06	06	2	02	0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah/Kabupaten/Kota	Jumlah Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	12 Usulan	343.716.134	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Usulan	360.901.940
1	06	06				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Keluarga Miskin yang Mendapat Perlindungan Sosial	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	100%	1.168.555.064	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	1.226.979.666
1	06	06	2	01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Beperstok untuk Keluarga Korban Bencana	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	20 Paket	380.717.249	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20 Paket	399.749.961
1	06	06	2	01	0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	5000 Orang	109.598.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5000 Orang	115.078.320
1	06	06	2	01	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakalan dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	1000 Orang	143.347.545	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1000 Orang	150.511.772

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2027				Catatan	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2028	
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu Indikatif)	Sumber		Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu Indikatif)
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
							Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota							
1	06	06	2	01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	30 Orang	39.256.304	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30 Orang	41.219.119
1	06	06	2	01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	50 Orang	21.375.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50 Orang	22.443.750
1	06	06	2	01	0007	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	1 Tempat	67.140.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Tempat	70.497.000
1	06	06	2	02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan BencanaKabupaten/Kota	Jumlah jiwa terdampak bencana yang mendapatkan bantuan (Bencana Banjir)	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	50 Jiwa	787.837.815	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50 Jiwa	827.229.705
1	06	06	2	02	0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan KampungSiaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	3 Kampung	31.138.560	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 Kampung	32.695.488
1	06	06	2	02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna SiagaBencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan,	25 Orang	400.680.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25 Orang	420.714.000

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2027				Catatan	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2028	
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu Indikatif)	Sumber		Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu Indikatif)
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
							Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kelurahan/ Desa						
1	06	06	2	02	0003	Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda	Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	20 Orang	166.176.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20 Orang	174.484.800
1	06	06	2	02	0005	Fasilitasi Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana	Jumlah kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	3 Desa / Kelurahan	125.673.975	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 Desa / Kelurahan	131.957.673
1	06	06	2	02	0007	Fasilitasi Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	50 Keluarga	27.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50 Keluarga	28.350.000
1	06	06	2	02	0008	Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	250 Orang	37.169.280	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		250 Orang	39.027.744
1	06	07				PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase PSKS yang Berkontribusi dalam Proses Penangan PPKS	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	100%	52.519.653	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	55.145.635

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2027				Catatan	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2028	
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu Indikatif)	Sumber		Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu Indikatif)
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	06	07	2	01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	2 Makam	52.519.653	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Makam	55.145.635
1	06	07	2	01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	2 Makam	52.519.653	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Makam	55.145.635
						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANANDASAR								
2	08					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DANPERLINDUNGAN ANAK								
2	08	02				PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	31%	955.612.889	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		34%	1.003.603.532
						Persentase Perempuan yang ditingkatkan Keterampilan			100%				100%	
2	08	02	2	01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah KewenanganKabupaten/Kota	Jumlah SKPD yang Melaksanakan Responsif Gender	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	38 SKPD	179.505.843	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		38 SKPD	188.481.135
2	08	02	2	01	0015	Advokasi dan sosialisasi terkait penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan,	91 Lembaga	179.505.843	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		91 Lembaga	188.481.135

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2027				Catatan	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2028	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu Indikatif)	Sumber		Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu Indikatif)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						socialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota	Semua Kelurahan/ Desa						
2	08	02	2	02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Angkatan Kerja Perempuan yang Mendapatkan Advokasi	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	100 Orang	182.577.442	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	100 Orang	191.706.314
2	08	02	2	02	0011	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM organisasi kemasyarakatan, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	160 Orang	106.531.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	160 Orang	111.857.760
2	08	02	2	02	0013	Advokasi dan sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan/atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	5 Lembaga	76.046.242	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5 Lembaga	79.848.554
2	08	02	2	03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Koordinasi dan Kolaborasi antar Lembaga Sistem Penyelenggaraan Program Pemberdayaan Perempuan yang Lebih Efektif dan Responsif	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	100%	593.729.604	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	100%	623.416.083
2	08	02	2	03	0013	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan,	5 Lembaga	243.756.348	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5 Lembaga	255.944.165

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2027				Catatan	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2028	
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu Indikatif)	Sumber		Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu Indikatif)
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
							dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Semua Kelurahan/ Desa						
2	08	02	2	03	0014	Kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kab/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	1 Dokumen	349.973.256	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	367.471.918
2	08	03				PROGRAM PEREMPUAN PERLINDUNGAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan komprehensif	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	100%	159.301.037	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	167.266.088
2	08	03	2	01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Kekerasan Perempuan yang ditindaklanjuti dan atau diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	100%	88.718.537	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	93.154.463
2	08	03	2	01	0009	Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KIP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KIP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tingkat Kab/Kota, dan masyarakat	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	1 Kegiatan	88.718.537	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Kegiatan	93.154.463
2	08	03	2	03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Petugas Layanan yang telah mengikuti pelatihan penanganan perempuan korban kekerasan	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	100%	70.582.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	74.111.625

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2027				Catatan	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2028	
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu Indikatif)	Sumber		Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu Indikatif)
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	08	03	2	03	0013	Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat Kab/Kota (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	40 Lembaga	70.582.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		40 Lembaga	74.111.625
2	08	04				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak sesuai Standar	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	100%	573.207.883	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	601.868.275
2	08	04	2	01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keluarga Sasaran yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	100%	303.018.124	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	318.169.029
2	08	04	2	01	0006	Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	10 Orang	106.148.948	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10 Orang	111.458.395
2	08	04	2	01	0007	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	1 Dokumen	196.869.176	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	206.712.634

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2027				Catatan	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2028	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu Indikatif)	Sumber		Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu Indikatif)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.							
2	08	04	2	02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang memenuhi standar layanan	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	100%	270.189.759	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	100%	283.699.246
2	08	04	2	02	0007	peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	6 Lembaga	270.189.759	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	6 Lembaga	283.699.246
2	08	05				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	100%	57.313.501	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	100%	60.179.176
2	08	05	2	01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengumpulan, Pengolahan Analisis Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	100%	57.313.501	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	100%	60.179.176

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2027				Catatan	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2028	
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu Indikatif)	Sumber		Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu Indikatif)
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	08	05	2	01	0007	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kab/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak tingkat Kab/Kota yang Tersedia	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	1 Dokumen	57.313.501	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	60.179.176
2	08	06	2	01		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	63 Indeks	682.766.068	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		64 Indeks	716.904.370
2	08	06	2	01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha/Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan Layak Anak	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	100%	262.859.652	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	276.002.634
2	08	06	2	01	0009	Bimbingan Teknis dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Perangkat Kab/Kota serta lembaga non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan Kab/Kota yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	240 Orang	262.859.652	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		240 Orang	276.002.634
2	08	06	2	02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang memenuhi standar layanan ramah anak.	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	100%	419.906.416	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	440.901.738

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2027				Catatan	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2028	
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu Indikatif)	Sumber		Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu Indikatif)
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	08	06	2	02	0007	Kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	240 Lembaga	319.011.016	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		240 Lembaga	334.961.586
2	08	06	2	02	0013	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Lembaga tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	12 Lembaga	100.895.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Lembaga	105.940.170
2	08	07				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Indeks Perlindungan Khusus Anak	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	88,8 Indeks	128.524.021	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		88,9 Indeks	134.950.222
							Persentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan Layanan Komprhensif		100%				100%	
2	08	07	01			Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup DaerahKabupaten/Kota	Persentase Kasus Kekerasan Anak yang ditindaklanjuti	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	100%	128.524.021	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	134.950.222
2	08	07	2	01	0014	Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KIA) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KIA) tingkat Kab/Kota dan masyarakat.	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	1 Kegiatan	128.524.021	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Kegiatan	134.950.222
2	14					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGABERENCANA								
2	14	02				PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Kehamilan Tidak direncanakan (KTD)	Kabupaten Tabalong,	10,2%	446.647.814	Pendapatan Asli Daerah	10,2%		468.980.203

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2027				Catatan	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2028	
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu Indikatif)	Sumber		Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu Indikatif)
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
								Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa			(PAD)			
						Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)			14 Angka			13,6 Angka		
2	14	02	2	01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase Program Prioritas Kabupaten/Kota yang mengacu pada Program Prioritas Provinsi	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	100%	202.228.438	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	212.339.859
2	14	02	2	01	0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	10 Kegiatan	180.868.666	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10 Kegiatan	189.912.099
2	14	02	2	01	0055	Advokasi, promosi, dan pembinaan edukasi kependudukan pada Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di satuan pendidikan jenjang SD/ sederajat dan SMP/ Pramuka Peduli Kependudukan (Pramuka PK) di kwartir ASN Peduli Kependudukan (ASN PK) di lembaga kediklatan/OPD kabupaten/ serta Masyarakat Peduli Kependudukan (Mass PK) di Kampung KB/Ormas pengelola kelompok kegiatan masyarakat.	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan advokasi, promosi, dan pembinaan edukasi kependudukan pada Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di satuan pendidikan jenjang SD/ sederajat dan SMP/ Pramuka Peduli Kependudukan (Pramuka PK) di kwartir ASN Peduli Kependudukan (ASN PK) di lembaga kediklatan/OPD kabupaten/ serta Masyarakat Peduli Kependudukan (Mass PK) di Kampung KB/Ormas pengelola kelompok	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	1 Laporan / Dokumen	21.359.772	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Laporan / Dokumen	22.427.760

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2027				Catatan	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2028	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu Indikatif)	Sumber		Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu Indikatif)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	14	02	2	02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	kegiatan masyarakat. Persentase Data KB yang dilaporkan Tepat Waktu	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	100%	244.419.376	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	100%	256.640.344
2	14	02	2	02	0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	12 Laporan	123.589.876	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12 Laporan	129.769.369
2	14	02	2	02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	12 Dokumen	8.779.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12 Dokumen	9.218.475
2	14	02	2	02	0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangsa Kencana	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	12 Laporan	112.050.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12 Laporan	117.652.500
2	14	03				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mCPR)	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	90,8 Angka	1.067.088.955	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	90,85 Angka	1.120.443.401
							Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmeet Need)		3,43%				
2	14	03	2	01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Peningkatan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) setelah	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan,	100%	89.416.715	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	100%	93.887.550

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2027				Catatan	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2028	
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu Indikatif)	Sumber		Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu Indikatif)
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
							KIE	Semua Kelurahan/ Desa						
2	14	03	2	01	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBarigga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	1 Dokumen	89.416,715	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	93.887.550
2	14	03	2	02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Cakupan KB Aktif	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa		556.866,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			584.709.300
							Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi Menurut Alat/Cara KB Modern							
2	14	03	2	02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	950 Orang	556.866.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		950 Orang	584.709.300
2	14	3	2	03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi sertaPelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Permintaan Kontrasepsi yang terpenuhi Tepat Waktu	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	100%	420.806.240	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	441.846.551
2	14	03	2	03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	952 Orang	304.228.485	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		952 Orang	319.439.909

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2027				Catatan	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2028	
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu Indikatif)	Sumber		Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu Indikatif)
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	14	03	2	03	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	5 Unit	116.577.755	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5 Unit	122.406.642
2	14	04				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks Lansia Berdaya	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	67,55 Indeks	166.626.320	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		67,6 Indeks	174.957.835
							Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja		88,9 Indeks				88,95 Indeks	
							Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga		100%				100%	
2	14	04	2	01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok Ketahanan Keluarga yang Aktif	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	100%	152.860.670	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	160.503.703
2	14	04	2	01	0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	1 Laporan	152.860.670	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Laporan	160.503.703
2	14	04	2	02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah/Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok Tribina yang Aktif	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	100%	13.765.650	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	14.453.932
							Jumlah Calon Pengantin Mendapatkan Bimbingan Perkawinan dengan Materi Stunting		87%				88%	
							Persentase Kelompok		78%				79%	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2027				Catatan	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2028	
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu Indikatif)	Sumber		Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu Indikatif)
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
							Sasaran Mendapatkan Pendampingan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK)							
2	14	04	2	02	0008	Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	1 Laporan	13.765.650	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Laporan	14.453.932
						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANANDASAR								
2	08					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
2	08	03				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan komprehensif	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	100%	75.434.323	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	79.206.039
2	08	03	2	02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang menerima Layanan Rujukan Lanjutan	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	100%	75.434.323	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	79.206.039
2	08	03	2	02	0010	Layanan Pendampingan Korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	21 Orang	75.434.323	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		22 Orang	79.206.039
2	08	07				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS	Indeks Perlindungan	Kabupaten	88,8		Pendapatan		88,9 Indeks	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2027				Catatan	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2028	
								Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu Indikatif)	Sumber		Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu Indikatif)
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						ANAK	Khusus Anak	Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Indeks	101.570.798	Asli Daerah (PAD)		100%	106.649.337
							Persentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan Layanan Komprhensif		100%					
2	08	07	2	02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yangMemerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Anak Korban Kekerasan yang menerima Layanan Perlindungan Khusus	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	100%	101.570.798	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	106.649.337
2	08	07	2	02	0016	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Daerah Kab/Kota	Kabupaten Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	47 Orang	101.570.798	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		48 Orang	106.649.337
Jumlah										49.965.340.448				52.484.572.795

BAB V

PENUTUP

A. Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian, Baik Dalam Rangka Pelaksanaannya Maupun Seandainya Ketersediaan Anggaran Tidak Sesuai Dengan Kebutuhan

Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2027 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan Rancangan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 serta berpedoman pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029.

Selain itu Rencana Kerja juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan bagi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek. Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar Masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistemik / rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

B. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2027 bertujuan untuk meningkatkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan profesional. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2025-2029 tersebut, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempu dengan Langkah-langka sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong Tahun 2027, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui Kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang.

2. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan Masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.
3. Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2027 adalah dokumen perencanaan tahunan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun yang bersumber dari APBN.
4. Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2027, di dalam proses penyusunannya harus memperhatikan / mempedomani RPJMD 2025-2029 Pembangunan Kabupaten Tabalong.
5. Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2027 harus menjadi dasar pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

C. Rencana Tindak Lanjut

Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diikuti, diketahui dan dipahami oleh Masyarakat. Agar setiap Keputusan / kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi Masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasyarat demokratisasi dalam proses pengambilan Keputusan publik.

Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi Masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan Langkah-langkah sebagai berikut:

1. Terwujudnya perubahan paradigma pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan;
2. Terbangunnya kesadaran Masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, terwujudnya mekanisme kontrol dari anggota maupun kelompok Masyarakat yang lebih terbuka dan bertanggung jawab tentang penyelenggaraan pemerintahan;

3. Terwujudnya partisipasi aktif Masyarakat / swasta dalam kegiatan pembangunan;
4. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks, upaya yang harus ditempuh dapat melalui Pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana;
5. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana agar proses pembangunan yang dilaksanakan berdaya guna dan berhasil guna.
6. Meningkatkan peran serta Masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
7. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan.

Tanjung, Januari 2026
Kepala Dinas,

H. SYAMANI, S.P., M.P
Pembina Utama Muda (IVc)
NIP. 19750504 200003 1 012